



Komersialisasi dan pariwisata: Tantangan-tantangan dalam pengelolaan *Theme Park* berbasis konservasi satwa liar berkelanjutan di wilayah Jawa Tengah

Commercialization and tourism: Challenges in sustainable wildlife animal conservation-based Theme Park management in Central Java area

Eska Nia Sarinastiti^a, Muhamad Sidiq Wicaksono^b

^aProgram Studi Pariwisata, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281, Indonesia [+62 85730794609]

^bProgram Studi Bisnis Perjalanan Wisata, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Depok, Sleman, Yogyakarta, 55281, Indonesia [+62 818999353]

Article Info:

Received: 24 - 11 - 2020

Accepted: 17 - 03 - 2021

Keywords:

Animal conservation, commercialization, theme park, tourism

Corresponding Author:

Eska Nia Sarinastiti
Prodi Pariwisata, Sekolah
Vokasi, Universitas Gadjah
Mada;
Tel. +62 85730794609
Email:
eskaniastiti@ugm.ac.id

Abstract. *The purpose of this study was to determine the impact, challenges, and concept of ecotourism in managing theme parks based on sustainable wildlife animal conservation in Central Java. This research uses qualitative exploratory research. Data collection techniques include in-depth interviews and direct observation as primary data, while documentation, questionnaires, and literature studies are secondary data. Data analysis is divided into several stages: data coding, finding patterns, labeling themes, and developing category systems. The results showed that, first, positive impacts were obtained from conservation and sustainable tourism. Second, management challenges include external (outside the company scope) and internal (within the company scope). The external challenge most often faced by managers is the behavior of tourists who do not comply with the appeal in the theme park area. Meanwhile, the most crucial internal challenge is insufficient funding sources for the management and development of infrastructure. Third, ecotourism offers an alternative concept for sustainable management of theme parks economically and in conservation but requires large funds for realization.*

How to cite (CSE Style 8th Edition):

Sarinastiti EN, Wicaksono MS. 2021. Komersialisasi dan pariwisata: Tantangan-tantangan dalam pengelolaan *Theme Park* berbasis konservasi satwa liar berkelanjutan di wilayah Jawa Tengah. *JPSL* 11(1): 69-82. <http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.11.1.69-82>.

PENDAHULUAN

Kelimpahan kekayaan spesies satwa liar menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi ke-3 di dunia. Satwa liar menjadi aset negara yang harus dijaga populasinya bahkan ditingkatkan. Upaya konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia dilakukan dan dilaksanakan secara *in situ* dan *ex situ*. Upaya konservasi secara *ex situ* dilakukan dengan pemberian izin bagi lembaga-lembaga yang turut berpartisipasi dalam aktivitas konservasi spesies (DJ KSDAE, 2018). *In situ* didefinisikan sebagai konservasi di habitat aslinya, alam bebas, sementara *ex situ* adalah konservasi yang berada di luar habitat aslinya identik dengan buatan atau konservasi dalam kandang (*captive conservation*) (Braverman, 2014). Lembaga konservasi *ex situ* di Indonesia semakin dibutuhkan seiring kapasitas *in situ* sudah semakin bertambah konflik antara manusia dan satwa. Jenis lembaga konservasi *ex situ* di Indonesia terbagi menjadi lembaga konservasi untuk kepentingan umum dan lembaga konservasi untuk kepentingan khusus. Diantara

keduanya, lembaga konservasi untuk kepentingan umum menjadi sasaran kontroversial dengan keberadaannya pada ruang lingkup pariwisata.

Lembaga konservasi *ex situ* untuk kepentingan umum menjadi kontroversial di kalangan masyarakat karena fungsinya bukan hanya sebagai lembaga konservasi satwa akan tetapi juga destinasi pariwisata. Lembaga konservasi bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan mengentaskan kemiskinan orang-orang yang hidup bersama satwa liar melalui beragam sektor yang kebanyakan melalui sektor pariwisata (Lamers *et al.*, 2014). Pariwisata menjadi salah satu sumber pendanaan untuk keberlanjutan tersebut. Sementara itu, pariwisata identik dengan komersialisasi dengan orientasinya pada kepentingan ekonomi atau pendapatan perusahaan. Lembaga konservasi untuk kepentingan umum yaitu dalam bentuk kebun binatang, taman safari, taman satwa, taman satwa khusus, museum *zoology*, kebun botani, taman tumbuhan khusus, dan herbarium (KLHK, 2019). Namun diantara satwa dan tanaman, yang sering menjadi media *framing* pro kontra antara komunitas lingkungan, pemerintah dan pengelola bisnis adalah taman rekreasi bertema konservasi satwa liar yang berisi satwa liar ditambah pengemasannya yang berkembang dalam bentuk taman bertema atau *theme park* yang identik menawarkan beragam wahana hiburan untuk pengunjung disamping satwa liar.

Adanya fungsi hiburan tersebut ditambah adanya media komunikasi pemasaran yang menekankan mereka sebagai daya wisata (Beardsworth dan Bryman, 2001) menjadikan taman bertema berbasis konservasi satwa liar syarat akan komersialisasi. Satwa dalam kebun binatang identik menjadi objek sumber hiburan dari pengunjung (Carr, 2016). Konservasi menjadi referensi untuk pendapatan pariwisata. Namun demikian, konservasi dalam pengelolaan pemerintah pun tidak cukup dalam sumber dayanya sehingga secara tidak efektif memenuhi *outcomes* konservasi karena konservasi dianggap memberikan *return on investment* (ROI) yang sedikit, sementara dalam pengelolaannya membutuhkan dana yang besar. Konservasi juga masuk relatif pada prioritas rendah dibandingkan kebijakan publik lainnya seperti kesehatan, pendidikan dan keselamatan. Pendemonstrasian konservasi melalui pariwisata mampu menghasilkan pendapatan yang memungkinkan bisnisnya dibuat untuk perlindungan spesies (Catlin *et al.*, 2012). Saat ini kebun binatang sebagai salah satu bentuk *theme park* berbasis konservasi satwa liar dihadapkan pada komitmen mereka sebagai pusat konservasi atau fokus pada tempat hiburan yang akan menimbulkan kritik yang meningkat, bukan hanya dari pelindung satwa tapi juga dari kelompok pelindung konservasi satwa alam liar (Keulartz, 2015).

Oleh karena itu, taman bertema konservasi satwa liar mengemas diri mereka sebagai *modern zoo* yang memperkenalkan fungsi mereka sebagai tempat konservasi satwa, edukasi lingkungan, penelitian dan hiburan (Carr dan Cohen, 2011; Ballantyne *et al.*, 2018). Biodiversitas adalah isu signifikan layaknya perubahan iklim (Hall, 2010). Tantangan konservasi semakin kompleks dan *urgent*, kebutuhan terhadap pendekatan yang berbasis ilmiah dan inovatif meningkat. Istilah "*ex situ*" dapat menjadi masalah untuk mendefinisikan keadaan-keadaan tertentu, yang terkadang sulit untuk didefinisikan secara tepat kondisinya yang mendefinisikan "*wild*" atau "*managed*" dalam kondisi saat ini dengan adanya peningkatan perubahan *landscape*. Namun, di sisi lain terdapat manfaat dari keberadaan taman rekreasi bertema konservasi satwa liar yang harus diakui bahwa program yang fokus pada konservasi baik untuk mengedukasi dan menghibur pengunjung dapat membantu mempromosikan kesadaran publik tentang biodiversitasnya dan nilai-nilainya (Catibog-Sinha, 2008). *Theme park* berbasis konservasi satwa liar harus mampu menjalankan fungsinya sebagai lembaga konservasi satwa sekaligus destinasi pariwisata.

Penelitian ini akan fokus membahas tentang tantangan-tantangan dalam pengelolaan *theme park* yang memengaruhi keberhasilan konservasi satwa liar dan pariwisata, dampak pengelolaan pada kedua aspek yakni konservasi satwa liar dan pariwisata yang berkelanjutan, dan mengkaji *ecotourism* (ekowisata) sebagai konsep alternatif dalam pengelolaan *theme park* berbasis konservasi satwa liar yang berkelanjutan. Banyak penelitian sebelumnya khususnya di Indonesia yang lebih melihat dari satu sisi saja, hanya aspek konservasi atau aspek pariwisata sehingga tidak dilihat korelasi simbiosis mutualisme keduanya. Ketegangan persaingan antara memberikan kepuasan motivasi *hedonistic* wisatawan (*entertainment* dan rekreasi) dan penyampaian pesan-pesan kunci konservasi tetap menjadi isu bagi kebun binatang dan banyak tempat wisata (*tourism sites*) (Calver dan Page, 2013). Sementara, penelitian ini melihat dari sisi keduanya sehingga penelitian ini diharapkan

mampu berkontribusi dalam memberikan bahan evaluasi untuk identifikasi dampak, tantangan dan konsep alternatif dalam pengelolaan yang mendorong adanya konsep perencanaan dan pengelolaan yang berimbang sesuai dengan kode etik konservasi satwa liar dan pariwisata yang berkelanjutan.

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif eksploratif dengan pendekatan rekursif. Penelitian kualitatif melibatkan hubungan antara berbagai elemen, suatu pendekatan yang disebut rekursif. Pembentukan pertanyaan penelitian dalam pendekatan ini berkembang seiring dengan kemajuan penelitian, analisis dan pengumpulan data dilakukan bersama-sama, dan penulisan seringkali merupakan proses evolusi, bukan proses terpisah yang terjadi pada akhir penelitian (Veal, 2006). Penelitian ini dilakukan selama satu tahun 2020 pada beberapa lokasi *theme park* yang memiliki status kelembagaan konservasi *ex situ* di wilayah Jawa Tengah. Pemilihan wilayah dikarenakan industri *theme park* di Jawa Tengah sedang berkembang untuk mendapatkan *positioning*-nya sebagai ikon wisata daerah di pasar wisatawan khususnya wisatawan domestik. *Themes park* di wilayah Jawa Tengah yang menjadi lokasi penelitian mencakup Ndayu Park Sragen, Serulingmas Zoo Banjarnegara, Batang Dolphin Center (BDC), Wersut Seguni Indonesia (WSI), dan Taman Satwa Taru Jurug Surakarta (Jurug Solo Zoo).

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung sebagai data primer, serta dokumentasi dan kuesioner tertutup sebagai data sekunder atau pendukung penelitian. Selain itu, data penelitian juga diperoleh melalui studi literatur untuk mengkaji *ecotourism* sebagai konsep alternatif pengelolaan untuk mewujudkan konservasi satwa liar dan pariwisata yang berkelanjutan. Informan untuk wawancara dipilih berdasarkan *purposive sampling* atau sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga informan adalah pengelola yang fungsinya pada bagian *human resources development*, konservasi, dan pemasaran. Sesuai dengan karakteristik informan tersebut, diperoleh informan sejumlah 10 dari bagian fungsi konservasi (Paramedis dan administrasi konservasi Serulingmas Zoo, dokter hewan WSI dan Jurug Solo Zoo, Manajer Konservasi Jurug Solo Zoo, Staf Konservasi BDC, dan 5 *keeper* dari kelima *theme park*), 4 dari bagian fungsi *marketing* (Direktur Serulingmas Zoo, Manajer Operasional WSI, Staf Pemasaran Ndayu Park, dan Staf Pemasaran Jurug Solo Zoo) dan 1 dari fungsi bagian *human resource development* (HRD BDC).

Metode Analisis Data

Data penelitian secara kualitatif menggunakan beberapa tahap analisis dari Patton (2002). Tahap pertama yaitu *coding data*, *finding pattern*, *labeling themes*, dan *developing category system*. Pada tahap *coding* dan pengklasifikasian data dalam pola, tema, dan kategori dipertimbangkan konvergensi dan divergensi dalam data. Konvergensi mencakup dua jenis data, yakni data penelitian yang memiliki kesamaan dan perbedaan diantara kategori yang telah ditentukan. Sementara itu, divergensi adalah saat dalam analisis peneliti menemukan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan penelitian sehingga tidak dimasukkan dalam kategori analisis data. Tahap kedua, interpretasi data dalam penelitian ini terfokus pada makna hasil penelitian yang relevan dalam menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Interpretasi data terdiri dari *comparison*, *causes*, *consequences*, dan *relationship*. *Comparison* dilakukan dengan membandingkan hasil temuan data antara hasil wawancara, observasi langsung, dokumentasi, dan kuesioner. *Causes* dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang berperan memengaruhi keberhasilan pengelolaan *theme park*. *Consequences* dilakukan dengan menganalisis dampak dari pengelolaan *theme park* terhadap konservasi satwa dan pariwisata berkelanjutan. *Relationship* dilakukan dengan saling menghubungkan antara data hasil penelitian, yang secara khusus menghubungkan antara tantangan dan dampak dalam pengelolaan

theme park dengan konsep strategi alternatif pariwisata berkelanjutan, khususnya *ecotourism*. Analisis konten atau isi dilakukan pada regulasi-regulasi pemerintah terkait pengelolaan konservasi satwa liar dan pariwisata yang berkelanjutan dalam sebuah *theme park* yang berstatus lembaga konservasi *ex-situ*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Keberadaan *Theme park* Berbasis Konservasi Satwa Liar terhadap Konservasi dan Pariwisata Berkelanjutan

Sebelum masuk pada pembahasan tentang tantangan-tantangan dalam pengelolaan *theme park* berbasis konservasi satwa, perlu diketahui pula sejauh mana dampak adanya *theme park* berbasis konservasi satwa ini terhadap konservasi satwa liar dan pariwisata berkelanjutan. Namun, arti dampak dalam penelitian ini terbatas dari perspektif pengelola *theme park* berstatus lembaga konservasi *ex-situ*, belum pada wisatawan maupun pihak pemerintah yang bisa menjadi gambaran publik terkait pentingnya *theme park* untuk konservasi satwa liar dan pariwisata berkelanjutan. Dampak untuk konservasi mencakup keseimbangan ekosistem, peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya konservasi pengembalian populasi satwa yang hampir punah. Sementara itu, dampak untuk pariwisata tampak pada ranah ekonomi yang mencakup peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan pendapatan perusahaan, peningkatan pendapatan masyarakat sekitar *theme park* (pedagang makanan dan penjual souvenir). Berdasarkan hasil penelitian, dampak yang paling banyak diperoleh diantara konservasi dan pariwisata dari perspektif pengelola bisa dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Dampak keberadaan *theme park* berbasis konservasi satwa terhadap konservasi dan pariwisata

No.	Komponen Dampak	Ndayu Park Sragen	Jurug Solo Zoo	Serulingmas Zoo	Batang Dolphin Center	Wersut Seguni Indonesia
1.	Peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal untuk bekerja di <i>theme park</i>	—	√	√	√	√
2.	Peningkatan pendapatan perusahaan	—	√	√	√	√
3.	Peningkatan pendapatan masyarakat sekitar <i>theme park</i>	—	√	√	√	√
4.	Keseimbangan ekosistem	√	√	√	√	√
5.	Pengembalian populasi satwa yang hampir punah	—	√	√	√	√
6.	Peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya konservasi	√	√	√	√	√
7.	Kerusakan lingkungan sekitar <i>theme park</i>	—	—	—	—	—
8.	Kebisingan	—	—	—	—	—
9.	Konflik dengan masyarakat sekitar	—	—	—	—	—

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Pariwisata yang berbasis kehidupan satwa liar dapat mempromosikan konservasi lingkungan (Putu *et al.*, 2017). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya dampak dari adanya penyelenggaraan *theme park* berbasis konservasi satwa liar sendiri mayoritas adalah keseimbangan ekosistem dan peningkatan kesadaran konservasi pada masyarakat. Dampak yang paling banyak diperoleh lainnya adalah peningkatan pendapatan perusahaan, nilai konservasi menjadi *core value* sendiri untuk bisnis perusahaan. Dampak lainnya terdapat penyerapan tenaga kerja daerah asal *theme park* yang memang diutamakan untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat lokal sehingga bisa mencegah adanya konflik sosial dengan masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat

sekitar dengan penawaran penyediaan *booth* jualan *souvenir*, oleh-oleh, *food court*, dan sejenisnya, serta pengembalian populasi satwa yang hampir punah (*reintroduction*), akan tetapi seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh pengelola *theme park* di Jawa Tengah, bahwa masih dalam skala kecil realisasinya. Sulitnya realisasi disebabkan oleh kesulitan untuk *captive breeding* dengan ketersediaan satwa liar yang tidak berpasangan. Pengelola harus melakukan pertukaran satwa antar lembaga konservasi untuk *breeding* karena tidak diperbolehkan *inbreeding* yang berisiko pada kelahiran cacat. Sementara, untuk melakukan pertukaran satwa para pengelola terkendala dengan administrasi yang panjang dan rumit dari pemerintah, mengingat satwa liar yang terancam punah adalah aset negara. Penelitian ini pun belum mampu memperoleh data secara pasti terkait jumlah satwa yang kembali dilepasliarkan kembali sehingga perlu dikaji untuk penelitian selanjutnya.

Sementara itu, jika digali terkait kerusakan lingkungan sekitar *theme park*, kebisingan, dan konflik dengan masyarakat sekitar tidak ditemukan yang dikonfirmasi melalui hasil penelitian tampak pada Tabel 1. Secara lokasi kelima *theme park* berada pada lahan yang luas dan jauh dari pemukiman warga, misal seperti Ndayu Park berada di tengah-tengah persawahan, beberapa *spot* laguna dan hutan; BDC berada di wilayah pesisir Pantai Sigandu; Serulingmas Zoo berada di area dekat Sungai Serayu; WSI berada di Pesisir Pantai Cahaya; Jurug Solo Zoo berada di dekat area Sungai Bengawan Solo. Kelimanya berada pada area yang sudah mendukung konservasi berkelanjutan, yakni area sumber air yang berlimpah agar pengelolaan air secara berkelanjutan bisa memenuhi kebutuhan ekosistem vegetasi tanaman maupun satwanya, tanpa khawatir kekurangan air dengan mengingat perubahan iklim yang tidak bisa memprediksi periode musim di Indonesia. Masing-masing *theme park* juga memiliki *partner* untuk pengelolaan sampah mulai dari Dinas Lingkungan Hidup hingga komunitas petani yang menjadikan kotoran hewan menjadi pupuk alami. Bahkan, seperti Serulingmas Zoo berkoordinasi dengan *Indonesia Power* dalam pengelolaan sampah daun.

Tantangan Internal dan Eksternal dalam Pengelolaan *Theme park* Berbasis Konservasi Satwa Liar

Tantangan dalam pengelolaan *theme park* berbasis konservasi satwa bisa dikategorikan menjadi dua berdasarkan hasil penelitian, yakni tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal yakni tantangan-tantangan yang berasal dari dalam lingkup perusahaan, mencakup sumber *funding* yang kurang untuk pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana konservasi; jumlah sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan yang ahli dalam konservasi kurang; dan regulasi pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup [KLH], Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati [KKH], Balai Konservasi Sumber Daya Alam [BKSDA]) yang standarnya sulit dipenuhi oleh lembaga konservasi *ex situ* dalam bentuk taman rekreasi. Sementara untuk tantangan eksternal, yakni tantangan yang berasal dari ruang lingkup luar perusahaan, mencakup keberadaan lembaga sosial masyarakat (LSM) atau *non profit organization* (NGO) di bidang konservasi satwa yang kontra terhadap perusahaan; kondisi lingkungan, iklim dan cuaca; wisatawan yang kurang sadar kebersihan lingkungan; dan wisatawan yang tidak mematuhi himbauan di area *theme park*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap *theme park* memiliki perbedaan dan kesamaan tantangan yang tampak pada Tabel 2.

Tantangan dalam pengelolaan taman rekreasi yang berbasis konservasi di Jawa Tengah, mayoritas berkaitan dengan ketersediaan sumber dana perusahaan dan perilaku wisatawan. Tantangan dalam bisnis pariwisata yang berkaitan dengan perlindungan biodiversitas adalah kurangnya dana untuk operasional dengan skala aktivitas ekonomi yang kecil (Buckley, 2002). Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi bahwa pemberian izin konservasi diberikan pada hanya pelaku usaha non perorangan yang dalam bentuk badan usaha milik Negara; badan usaha milik daerah; badan usaha milik swasta; lembaga penelitian yang kegiatannya meliputi penelitian tumbuhan dan satwa liar; lembaga pendidikan formal, dan komparasi. Adanya status kelembagaan tersebut diartikan bahwa lembaga konservasi *ex situ* yang kepemilikannya non pemerintah harus membiayai dirinya sendiri untuk keberlanjutan konservasi.

Namun, sumber *funding* masih kurang untuk pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana mengingat bahwa dengan aturan pemerintah tersebut lembaga konservasi *ex situ* harus badan usaha yang berarti pendanaan secara mandiri tanpa bantuan pemerintah, ditambah dengan keadaan *pandemic* seperti ini terjadi penutupan operasional di awal *pandemic* yang memakan waktu 3 hingga 4 bulan memengaruhi pendapatan perusahaan karena mengingat juga sumber utama adalah dari tiket masuk dan ditambah setelah pembukaan masih ada risiko penularan *covid* yang memerlukan waktu untuk mengembalikan posisi keuangan seperti semula. Terdapat beberapa tantangan, yakni terbatasnya ruang yang tersedia untuk *captive breeding*, tingginya biaya *captive breeding* dalam kebun binatang, *reintroduction captive breeding* satwa liar membutuhkan *monitoring* dan perbaikan, jika secara signifikan memberikan pengaruh pada konservasi, dan ketersediaan habitat yang cocok dan aman untuk satwa liar (Tribe dan Booth, 2003). Setiap spesies memiliki karakteristik genetik dan demografi yang berbeda sehingga menjadi tantangan kesesuaian antara program *breeding* dengan karakteristik mereka dengan melihat kemampuan skill dan budget kebun binatang. Dengan demikian, kebun binatang harusnya secara hati-hati memilih dan memprioritaskan spesies mana saja yang bisa dikembangkan dalam penangkaran (Catibog-Sinha, 2008).

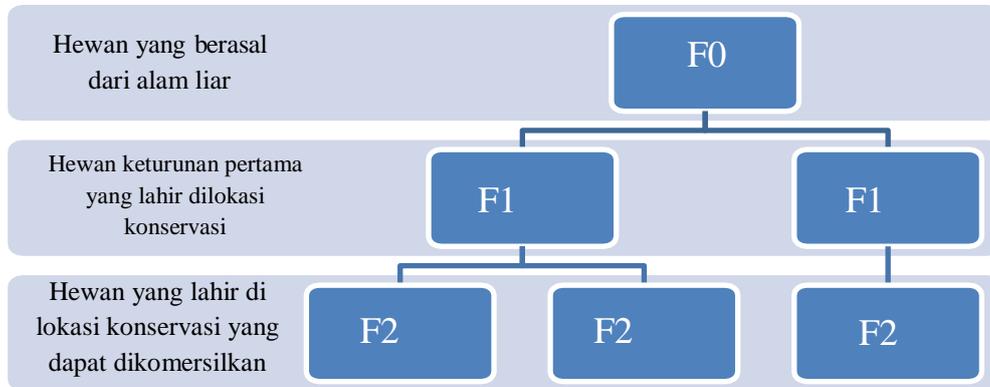
Tabel 2 Tantangan-tantangan dalam pengelolaan *Theme park* berbasis konservasi satwa

No.	Komponen Tantangan	Ndayu Park Sragen	Jurug Solo Zoo	Serulingmas Zoo	Batang Dolphin Center	Wersut Seguni Indonesia
1.	Keberadaan LSM	—	—	—	—	√
2.	Masyarakat Lingkungan Sekitar yang Kontra terhadap keberadaan <i>theme park</i>	—	—	—	—	—
3.	Regulasi Pemerintah (KLH, KKH, BKSDA)	—	√	√	—	√
4.	Kondisi Lingkungan, Iklim, dan Cuaca Sekitar <i>Theme Park</i>	—	—	√	√	√
5.	Sumber Funding yang kurang untuk pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana konservasi	—	√	√	√	√
6.	Jumlah SDM Internal yang ahli dalam konservasi kurang	√	√	√	—	—
7.	Wisatawan yang kurang sadar kebersihan lingkungan	—	—	√	√	√
8.	Wisatawan yang tidak mematuhi himbauan di area <i>Theme Park</i> (contoh: melanggar memberi makan satwa, merokok di area satwa, dan sejenisnya)	—	√	√	√	√

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Selain itu, status sebagai tempat wisata berbasis konservasi di Indonesia memiliki beberapa level, selain sebagai lembaga konservasi, beberapa lokasi observasi memiliki izin sebagai lokasi penangkaran hewan. Izin lokasi penangkaran tersebut dikeluarkan berdasarkan jenis hewan. Misalnya seperti Serulingmas Zoo memiliki Izin Penangkaran untuk Rusa Sambar, Rusa Timor, dan Rusa Bawen. Perbedaan antara Lembaga Konservasi dan Penangkaran adalah Izin Penangkaran Hewan memperbolehkan lembaga untuk memanfaatkan hewan tangkaran untuk kepentingan komersial lain seperti diperjual-belikan. Persyaratan hewan yang dapat diperjualbelikan adalah hewan yang berstatus F2 atau keturunan kedua dari hewan yang ditangkarkan dengan ketentuan adanya *surplus* (jumlah satwa berlebih) pada lembaga tersebut. Permasalahan dari penentuan status

F0 sampai keturunan dibawahnya adalah dalam proses *tagging* atau penentuan status tersebut bagi hewan yang telah memiliki populasi yang banyak. Proses *tagging* yang kompleks berakibat pada pembengkakan biaya, sehingga beberapa Lembaga Konservasi belum melakukan *tagging* pada hewan koleksi dan tangkarannya. Pentingnya proses *tagging* tersebut untuk menentukan asal usul hewan serta melacak keturunan hewan tersebut. Tingkat status satwa bisa dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Tingkat status satwa di lembaga konservasi *ex situ* dan penangkaran (Sumber: Dokumentasi peneliti)

Sementara itu, berkaitan dengan wisatawan, masih ditemukannya wisatawan yang tidak mematuhi himbauan di area *theme park*, seperti memberi makan satwa yang tidak sesuai nutrisi yang diperlukan seperti tampak pada Gambar 2. Karena jika dilihat dari hasil observasi, ada beberapa plastik dan makanan yang bukan khusus satwa ditemukan didalam tubuhnya. Selain itu, bentuk pelanggaran terhadap himbauan yang diberikan pengelola diantaranya membahayakan diri dengan melewati batas (*barrier*) untuk berinteraksi dengan satwa dan tidak mengikuti protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan tidak *social distancing* (menjaga jarak).



Gambar 2 Pengunjung masih memberikan satwa padahal sudah ada larangan yang diberikan oleh pengelola (Sumber: Data diolah oleh peneliti)

Wisatawan yang kurang sadar kebersihan lingkungan juga menjadi tantangan sendiri mengingat kebersihan lingkungan menjadi indikator kesejahteraan hewan. Wisatawan masih cenderung membuang sampah sembarangan padahal sudah disediakan tempat sampah dan merokok di area *theme park* padahal sudah ada tulisan “*no smoking*” yang asap rokoknya masuk area *exhibit* maupun *enclosure* satwa dan bisa membahayakan satwa. Hal tersebut disebabkan oleh literasi masyarakat terhadap keberadaan *theme park* sebagai lembaga konservasi *ex situ* yang minim. Pengetahuan pengunjung *theme park* berbasis konservasi satwa lebih mengetahui fungsinya sebagai tempat rekreasi saja, belum pada fungsinya sebagai lembaga konservasi sehingga masih ditemukan pelanggaran yang dilakukan wisatawan. Pengunjung tidak mengetahui

keberadaan dual fungsi yang dimiliki *theme park* yakni sebagai tempat hiburan sekaligus lembaga konservasi *ex situ*. Pengawasan dari pihak pengelola diperlukan untuk mengingatkan wisatawan agar memenuhi peraturan di area konservasi.

Peningkatan media edukasi diperlukan juga untuk calon wisatawan yang berkunjung ke taman rekreasi khususnya yang statusnya Lembaga Konservasi karena dalam aktivitas wisata tidak bisa disamakan dengan taman rekreasi yang lain yang bukan hanya mementingkan *leisure* tapi juga pelestarian satwa dan keragaman hayati lainnya yang berada pada ancaman kepunahan. Tantangan dalam keberhasilan edukasi konservasi adalah beragamnya jenis program dengan melibatkan beragam target *audience* dengan karakteristik yang berbeda-beda dalam hal tingkat pemahaman dan pengetahuan konservasi untuk menjadikan konservasi sebagai kebutuhan sosial dan skala prioritas wisatawan dalam berkunjung guna mendukung peran edukasi konservasi mereka (Mellish *et al.*, 2019; Ballantyne dan Packer, 2016). Ketepatan metode evaluasi menjadi hal yang krusial untuk melihat hasil efektivitas pada program edukasi terhadap pengetahuan pengunjung, perlu adanya pra *survey* pada wisatawan sebelum dan sesudah berkunjung (Mellish *et al.*, 2019). Namun, dalam pelaksanaan evaluasi juga membutuhkan dana yang besar untuk berkelanjutan terkait ketersediaan SDM dan sarana prasarana.

Tantangan lainnya adalah regulasi pemerintah khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diwakili BKSDA dalam penyelenggaraan program konservasi dan pariwisata yang ditunjukkan melalui indikator penilaian yang *strict* dalam laporan pertanggungjawaban terkait penerapan program konservasi dan pariwisata yang berkelanjutan. Beberapa negara mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan polutan di lingkungan dan pengendalian limbah mereka. Pengelolaan limbah harus dilakukan sesuai regulasi lokal (Rees, 2011), akan tetapi belum terdapat regulasi pemerintah Indonesia yang secara spesifik mengaturnya, sehingga para pengelola harus memiliki inisiatif dan *upgrading* inovasi dalam pengelolaan limbah khususnya limbah satwa dan sampah yang dihasilkan wisatawan. Hal ini dilakukan agar tidak mencemari lingkungan area *theme park* dan sekitarnya. Selain itu, berdasarkan *content analysis* terhadap aturan-aturan KLHK dan Kementerian pariwisata belum ditemukan aturan yang keduanya membahas secara bersamaan tentang pengelolaan *theme park* berbasis lembaga konservasi *ex situ* dengan konservasi dan pariwisata berkelanjutan, adapun aturan KLHK hanya menyebutkan terkait peragaan sesuai perilaku normalnya, tidak membahas tentang pengelolaan pariwisata yang melibatkan satwa yang dilindungi. Kementerian Pariwisata juga tidak mengatur dalam kebijakannya terkait kesejahteraan hewan dengan keterlibatan hewan untuk atraksi wisata di beberapa destinasi wisata atau paket wisata *tour operator*.

Pengembangan kebijakan kebun binatang dan perencanaan strategis secara umum belum dikelola secara jelas dalam tujuan organisasi (Fraser dan Wharton, 2007) dan direfleksikan dengan gambar-gambar berkonsep *entertainment* yang mendominasi *website* dan situs kebun binatang bahkan ketika mereka terutama didefinisikan sebagai tempat konservasi (Carr dan Cohen, 2011). *Guideline* yang kurang jelas dari manajemen untuk penyampaian pesan berbasis konservasi berpotensi diinterpretasikan sebagai kepentingan keuangan menjadi motivasi kebun binatang. (Wijeratne *et al.*, 2014). Tantangan dalam manajemen pariwisata berbasis satwa liar adalah dalam beberapa kasus terjadi ketidakkonsistensian antar tempat wisata berbasis satwa liar dalam pengkomunikasian tentang konservasi yang kemudian membingungkan wisatawan seperti apakah boleh memegang atau menyentuh satwa liar, apakah boleh memberi makan pada satwa liar. Perlu adanya sistem manajemen yang sama antar tempat wisata berbasis satwa liar mengenai pengkomunikasian konservasi. (Ballantyne *et al.*, 2009). Ketidakkonsistensian tersebut juga disebabkan oleh birokrasi regulasi pemerintah yang rumit dengan standar tinggi sementara tidak semua lembaga konservasi *ex situ* memiliki kekuatan pendanaan yang sama sehingga bagi pengelola dengan skala pendanaan konservasi kecil sulit untuk memenuhinya terkait fasilitas dan sumber daya manusia seperti yang disampaikan oleh pihak pengelola Ndayu Park.

“Peraturan yang sangat ketat dan birokrasi yang terlalu rumit membuat kita sangat berat dalam mencapai standar yang diterapkan tersebut. Bahkan dengan adanya studi banding ke beberapa *theme park* lain yang sama dengan kita terlihat jauh berbeda dari fasilitas dan SDM, karena memang SDM disini rata-rata mengandalkan warga sekitar, belum bisa memberdayakan tenaga-tenaga ahli” (Ndayu Park, 2020).

Jumlah sumber daya manusia (SDM) internal yang ahli dalam konservasi yang kurang juga menjadi tantangan untuk pelaksanaan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan konservasi dan pariwisata berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian terkait struktur organisasi pada masing-masing *theme park*, tidak semua lembaga konservasi *ex situ* memiliki tenaga medis dan fasilitas klinik bahkan masih ada *theme park* yang tenaga medis seperti dokter hewan masih bergantung pada dokter hewan yang berada di Dinas Peternakan seperti di Ndayu Park dan Serulingmas Zoo. Serta masih adanya *dual function* paramedis sekaligus ahli gizi di Serulingmas Zoo, *keeper* sekaligus ahli gizi di Ndayu Park, dan dokter hewan sekaligus ahli gizi di WSI. Ketersediaan tenaga medis dan fasilitas klinik pada masing-masing *theme park* bisa dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Ketersediaan tenaga medis dan fasilitas klinik

Fasilitas yang dimiliki untuk pengelolaan konservasi	Batang Dolphin Center	Serulingmas Zoo	Wersut Seguni Indonesia	Ndayu Park	Jurug Solo Zoo
Dokter Hewan	-	-	✓	-	✓
Paramedis	✓	✓	✓	-	✓
<i>Keeper</i>	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Nutritionist</i>	✓	✓	✓	✓	✓
Laboratorium	✓	-	✓	-	✓
Klinik Satwa	✓	✓	✓	-	✓
Ruang Karantina Mandiri	✓	✓	✓	-	✓

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Isu *gender* juga menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya jumlah tenaga konservasi di lingkungan kerja yang basisnya satwa dan mayoritas dominasi laki-laki, sehingga tidak bisa bertahan lama seperti yang terjadi di Serulingmas Zoo dokter hewan perempuan memiliki *turnover intention* yang tinggi sehingga sulit untuk memiliki dokter hewan yang tetap; di WSI yang dokter hewan serta operasional juga merangkap berfungsi sebagai staf edukasi dan *marketing*; dan sama halnya di BDC mengalami kendala terhadap sistem adat budaya lokal yang mayoritas tenaga kerja perempuan memiliki masa kerja yang singkat karena pernikahan seperti yang disampaikan pengelola BDC dalam kutipan wawancara sebagai berikut.

“Sistem budaya menjadi tantangan untuk kualitas kinerja khususnya perempuan yang memiliki adat setelah lulus SMA sudah dilamar. Jadi susah untuk mengikat tenaga kerja perempuan di sini. Sekarang kita punya prosedur aturannya harus 2 tahun dulu baru boleh menikah. Ya mau tidak mau bisa keluar setelah itu. Budaya tidak bisa kita paksakan, meskipun dia punya *skill* dan kita butuhkan. Di sini keluar masuknya memang begitu, kalau adat sudah susah. Persentasenya disini banyaknya cowok, mayoritas ya yang cewek keluar” (BDC, 2020).

Tantangan lainnya adalah kondisi lingkungan, iklim, dan cuaca sekitar *theme park*. Taman rekreasi berbasis konservasi konsepnya memang *outdoor* sehingga ketahanannya dalam operasional juga bergantung pada cuaca dan iklim. Kondisi lingkungan sekitar yang subur dan *supply* air yang melimpah sangat dibutuhkan untuk operasional taman rekreasi sendiri terutama bagi taman rekreasi yang memiliki satwa mamalia laut. Tanah yang subur juga membantu memberikan ekosistem pendukung yakni vegetasi tanaman yang melimpah untuk kenyamanan satwa layaknya di habitat aslinya. Selain itu, vegetasi tanaman yang beragam dan dalam kapasitas yang banyak juga membuat lingkungan sejuk dan memberikan kenyamanan wisatawan untuk beraktivitas lama di area *theme park*. Selain itu, kondisi lingkungan yang berada di pesisir pantai seperti BDC dan WSI memiliki tantangan dalam perawatan infrastruktur fisik seperti kandang-kandang satwanya yang mudah mengalami korosi seperti tampak pada Gambar 3, karena kandungan garam yang tinggi pada tanahnya dan udara yang temperaturnya lebih ekstrem sehingga diperlukan dana yang besar untuk mampu menyediakan bahan baku berkualitas tinggi yang tidak gampang rusak, akan tetapi karena minimnya dana pengelola masih

menggunakan bahan yang terjangkau menurut mereka. Namun demikian, penggunaan bahan tersebut tetap pada akhirnya memerlukan biaya *maintenance* yang tinggi pula agar tetap layak. Selain itu, keduanya juga harus menghadapi ancaman abrasi pantai, yang semakin lama mengikis area bibir pantai mengarah ke lokasi *theme park* sehingga untuk sementara mereka bendung dengan batu untuk mengurangi dampak abrasi tersebut.



Gambar 3 Kandang yang mengalami korosi
(Sumber: Dokumentasi peneliti)

Tantangan yang secara berkelanjutan dihadapi lainnya adalah keberadaan LSM yang kalau di Indonesia lebih pada posisi kontra terhadap keberadaan taman rekreasi berbasis konservasi satwa liar karena menurut mereka konservasi yang berada pada area pariwisata mengandung komersialisasi dan eksploitasi. Banyaknya perdebatan terkait penangkaran satwa dengan adanya banyak penolakan oleh komunitas internasional terhadap pertunjukan satwa untuk hiburan manusia seperti sirkus dan taman laut (*marine park*) (Scollen dan Mason, 2020). Selama ini mereka berusaha untuk melakukan mediasi yang biasanya difasilitasi oleh Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI), BKSDA, dan KKH untuk saling bertukar informasi dalam pengelolaan konservasi dan pariwisata, namun sampai saat ini belum ada penerimaan atau kesamaan pemahaman yang diperoleh antara keduanya. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pihak pengelola Serulingmas Zoo.

“Konservasi sering berbenturan dengan LSM karena visinya yang berbeda. LSM arahnya dibebaskan, namun lembaga konservasi tidak bisa menjamin bahwa satwa tersebut bisa bertahan hidup di hutan, apalagi perburuan satwa yang tinggi serta hutan yang tidak layak dihuni akibat kegiatan manusia. PKSBI juga membangun rumah sakit hewan namun tidak pernah diangkat media dan LSM, namun ketika ada satwa yang mati di kebun binatang langsung dikritik habis-habisan” (Serulingmas Zoo, 2020).

Pernyataan tersebut juga ditegaskan oleh pihak WSI dan Jurug Solo Zoo. “Lumba-lumba menjadi hewan *exotic* yang selalu menjadi sasaran *framing* eksploitasi dari LSM, padahal kami berusaha mencapai standar konservasi yang tinggi untuk penyelamatan satwa yang terancam punah karena tanggungjawab kami pada negara. Terbukti hampir setiap tahun kami memperoleh kelahiran baru lumba-lumba. Kita pada awalnya sudah berusaha memberikan edukasi pada mereka akan tetapi mereka masih saja kontra. Bahkan kami pernah dimediasi oleh BKSDA dan KKH, akan tetapi mereka tidak mau menemui kita, padahal kita datang untuk mencapai kesamaan pemahaman dan visi misi” (WSI, 2020).

“Terkait pengelolaan selalu berbenturan dengan LSM, mereka selalu mencari kejelekan kita. Biasanya jika Lembaga Konservasi lain mendapatkan sorotan dari LSM, kami juga terkena imbasnya. Kami berusaha terbuka untuk koordinasi memberikan penjelasan terkait kendala pengelolaan kami dan mencari tahu solusi yang mereka berikan apa saja, bukan hanya memberikan kritik. Misal seperti terkait kelayakan kandang, kami berusaha minta solusi pendanaan seperti apa, akan tetapi mereka tidak bisa memberikan jawaban.” (Jurug Solo Zoo, 2020)

Meskipun banyak protes, pengelola berusaha terus maju dengan melakukan *captive breeding* yang serius dan penelitian (Tribe dan Booth, 2003). Padahal jika di luar negeri kita bisa temukan integrasi antara konservasi dan pariwisata bisa berjalan beriringan seperti yang dilakukan *Australia Zoo* dan WWF dalam programnya *Wildlife Warriors* yang saling mendukung dalam upaya pendanaan. *Auckland Zoo* dengan programnya *Wild Work* dengan menawarkan partisipasi wisatawan dalam program konservasi yang dalam bentuk *conservation fund* dibantu dengan NGO untuk *funding*-nya sehingga mereka punya platform yang luas dan minim konflik. *Auckland Zoo* juga bekerjasama dengan beberapa taman nasional di beberapa negara untuk program konservasi, sehingga memiliki *back up management* yang kuat. Sama halnya dengan *Wellington zoo* bekerjasama dengan departemen konservasi pemerintah, NGO dan beberapa komunitas dilibatkan dalam beberapa program penyelamatan dan perawatan satwa liar. NGO cenderung pada penyediaan fasilitas klinik yang bukan hanya fokus pada satwa yang mereka miliki akan tetapi wadah/sarana untuk penyelamatan satwa liar dan pelepasliaran. Hal ini menjadi strategi yang efektif untuk keseimbangan antara pariwisata dan konservasi. Konservasi sering terkendala tidak sejalan antara penelitian dan manajemen (pengelolaan) sehingga diperlukan penelitian terkait pengelolaan yang berdasarkan hasil penelitian secara ilmiah yang memberikan kemanfaatan pada kelangsungan hidup satwa di alam liar, dengan cara melalui forum memperkuat staf pariwisata dan konservasi dengan secara langsung berpartisipasi dalam mendefinisikan masalah dan memprioritaskan pertanyaan-pertanyaan penelitian baik dari manajemen maupun staf yang memang bertanggung jawab dalam penyampaian layanan (*guides* dan *trackers/keeper*) (Muntifering, 2019; Gross, 2015). Selain itu, adanya pengiriman karyawan mereka pada konservasi *in situ* memiliki gambaran desain habitat spesies serta tanaman-tanaman yang mendukung ekosistemnya, yang layak diterapkan di lembaga *ex situ*, layaknya keadaan yang benar-benar dibutuhkan seperti ketika spesies tersebut berada di habitat asalnya (Wall dan Fulk, 2011). Keterlibatan komunitas, NGO dan wisatawan menjadi indikator penting dalam pengelolaan di samping *government involvement*. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi pengelolaan antara kategori *in situ* dan *ex situ* agar tercipta manajemen yang intensif terkontrol satu sama lain. (IUCN, 2014). Seharusnya bisa dilakukan kerjasama *project* antara pengelola *theme park* baik staf konservasi maupun pariwisata, NGO, komunitas, pemerintah, dan wisatawan dalam membentuk kepercayaan pada masyarakat luas akan keberadaan perusahaan tersebut sebagai tempat konservasi sekaligus wisata. Sementara, jika berdasarkan Tabel 2 tidak ditemukan bahwa masyarakat lingkungan sekitar yang kontra terhadap keberadaan *theme park*. Masyarakat sekitar cenderung mendukung karena keberadaan *theme park* mampu memberikan kontribusi ekonomi untuk mereka.

***Ecotourism* sebagai Alternatif Pilihan *Theme park* Berbasis Konservasi Satwa Liar Berkelanjutan**

Theme park berbasis konservasi satwa liar perlu untuk mengelola perannya yang beragam dan berpotensi menyebabkan konflik, pada kasus terkait konservasi, pendidikan dan pariwisata. Adanya fokus pada konservasi dan edukasi, *theme park* berbasis konservasi satwa liar yang salah satu bentuknya adalah kebun binatang menjadi perdebatan yang bisa dipertimbangkan didesain dalam bentuk atraksi ekowisata yang signifikan (Mason, 2000). Bentuk pariwisata yang memungkinkan menggunakan satwa/hewan dengan *animal rights*-nya adalah *ecotourism* baik secara teoritis maupun praktik, tetapi akan gagal jika memprioritaskan komersial dan kesenangan di atas kepentingan satwa (Fennell, 2012). Pariwisata yang berkelanjutan melalui *ecotourism* diidentifikasi sebagai salah satu ukuran untuk mewujudkan konservasi keragaman hayati baik di *in situ* maupun *ex situ* (Catibog-Sinha, 2010). Taman satwa harus menjadi taman alami. Jadi jika kebun binatang ingin sedikit risiko, mereka harus secara efektif simulasi pengalaman *ecotourism*, seperti “*a guided safari*” perlu direplikasi (Ryan dan Saward, 2004). *Ecotourism* menjadi gambaran hubungan manusia dan satwa yang skala keadilannya dalam “*deep justice*” dengan memahami dan menghargai *animal rights*. *Ecotourism* bisa dilihat pada *elephant viewing* di alam liar yang diselenggarakan oleh operator wisata yang etis di Afrika dan Asia. Meskipun terdapat disrupsi/gangguan yang minim serta elemen komersial yang tetap ada dihubungkan dengan wisatawan dan satwa liar lainnya, akan tetapi satwa liar bebas untuk melepaskan diri

dari interaksi mereka dengan manusia (Fennell dan Sheppard, 2020). Ekowisata menjadi elemen kunci yang menerapkan penggunaan sumber daya alam dengan kontribusinya pada konservasi, minim dampak negatif, skala kecil dan lebih terkontrol secara lokal dan memberikan dampak terhadap wilayah lokal/masyarakat sekitar (Mason, 2000).

Ecotourism pada destinasi wisata berbasis satwa identik dengan konsep Safari. Konsep Safari dalam kebun binatang yang menyediakan lingkungan alam habitat asli bagi spesies secara penuh menjadi konsep masa depan yang berkelanjutan untuk keberlangsungan hewan maupun tumbuhan yang dilindungi. Safari menyediakan pengalaman kehidupan satwa liar yang dibutuhkan oleh spesies dengan tidak membiarkan manusia mengganggu mereka ketika berkunjung. Konsep safari dengan mendorong wisatawan membayar lebih serta fokus pada upaya penuh konservasi menguntungkan program konservasi tanpa mengkhawatirkan kesejahteraan hewan. Namun, dengan konsep safari diperlukan investasi yang lebih besar dan membingkai ulang harapan publik termasuk kesabaran karena melihat binatang perlu membutuhkan lebih banyak usaha. Kebun binatang yang berbasis safari harus selaras dengan model bisnis yang berkelanjutan (Ron *et al.*, 2015). Banyak *modern zoo* di negara-negara maju bisa melaksanakan peran tersebut, akan tetapi sulit untuk kebun binatang negara-negara miskin (Catibog-Sinha, 2010). Hubungan antara taman rekreasi berbasis konservasi satwa seperti salah satunya kebun binatang dan ekowisata akan lemah jika edukasi kurang menarik, hanya sedikit presentase keberhasilan satwa dilepasliarkan (Fennell, 2013). Tur wisata seperti safari fotografi dengan satwa dan *wildlife watching* bisa memengaruhi satwa melalui gangguan suara, mengganggu penglihatan, penciuman dan memengaruhi perilaku memangsa dan *breeding* (Buckley, 2002) Pengelola dan operator secara berkelanjutan harus tetap berupaya mencari cara untuk memperbaiki aturan dan layanan pengambilan gambar (Cong *et al.*, 2014). Oleh karena itu, perlu adanya banyak hibah dan jaringan sumber pendanaan skala besar nasional dan internasional yang seharusnya disediakan oleh pemerintah secara khusus untuk lembaga konservasi *ex situ* yang berada pada lingkungan pariwisata untuk mampu membangun *theme park* dalam bentuk *ecotourism* yang sesuai dengan kode etik konservasi dan pariwisata yang berkelanjutan. Serta, model bisnis yang berkelanjutan di lembaga konservasi *ex situ* perlu dikaji dan dirancang secara detail baik oleh pengelola, akademisi, maupun pemerintah, mulai dari kebijakan hingga manajemen operasionalnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pertama dampak dari perspektif pengelola terhadap konservasi dan pariwisata berkelanjutan mencakup peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal untuk bekerja di *theme park*; peningkatan pendapatan masyarakat sekitar *theme park*; keseimbangan ekosistem; pengembalian populasi satwa yang hampir punah; dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait pentingnya konservasi satwa liar. Kedua, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan *theme park* berbasis konservasi satwa liar mencakup keberadaan LSM yang selalu kontra pada pengelolaan *theme park* yang menggunakan satwa sebagai daya tarik wisata; standar regulasi pemerintah lokal maupun nasional dalam pengelolaan tidak semua *theme park* bisa diterapkan, tergantung pada kemampuan pendanaan perusahaan mengingat status lembaga konservasi *ex situ* wajib sektor swasta dengan pendanaan mandiri; kondisi lingkungan, iklim, dan cuaca menjadi penentu kualitas infrastruktur fisik khususnya yang berada di pesisir pantai, yang kemudian akan berkaitan dengan kebutuhan dana yang besar dalam perawatan sarana prasarannya; sumber *funding* yang kurang untuk pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana *theme park*; jumlah SDM internal yang ahli dalam konservasi masih kurang; wisatawan masih ditemukan yang kurang sadar lingkungan; dan tidak mematuhi himbauan di area *theme park* terkait perlindungan satwa. Ketiga, konsep penerapan *ecotourism* bisa menjadi strategi yang tepat untuk penggunaan satwa liar yang dilindungi dalam pariwisata untuk keberlanjutan ekonomi dan konservasi *theme park*. Namun demikian, keberhasilan *ecotourism* balik lagi tergantung pada kemampuan pendanaan masing-masing *theme park*, sehingga perlu dukungan publik, komunitas, pelaku usaha wisata dan pemerintah terkait kebutuhan ekonomi, sosial maupun fisik untuk bisa mewujudkan *theme park* berbasis konservasi satwa yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pengelola Ndayu Park Sragen, Serulingmas Zoo Banjarnegara, Batang Dolphin Center, Wersut Seguni Indonesia, dan Jurug Solo Zoo data yang diberikan untuk mendukung penelitian ini. Selain itu, kami juga terimakasih pada Sekolah Vokasi yang memberikan pendanaan melalui hibah kompetitif yang kami peroleh sehingga penelitian ini bisa terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- [DJ KSDAE] Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 2018. *Statistik Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2017*. Jakarta (ID): Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- [IUCN] International Union for Conservation of Nature. 2014. *Guidelines on the Use of Ex situ Management for Species Conservation*. Version 2.0. Gland (CH): IUCN Species Survival Commission.
- [KLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi. Jakarta (ID): KLHK.
- Ballantyne R, Hughes K, Lee J, Packer J, Sneddon J. 2018. Visitors' values and environmental learning outcomes at wildlife attractions: implications for interpretive practice. *Tourism Manag.* 64: 190-201.
- Ballantyne R, Packer J. 2016. Visitors' perceptions of the conservation education role of zoos and aquariums: implications for the provision of learning experiences. *Visitor Studies*. 19(2): 193-210. doi: 10.1080/10645578.2016.1220185.
- Ballantyne R, Packer J, Hughes K. 2009. Tourists' support for conservation messages and sustainable management practices in wildlife tourism experiences. *Tourism Management*. 30: 658-664. doi: 10.1016/j.tourman.2008.11.003.
- Beardsworth A, Bryman A. 2001. The wild animal in late modernity the case of the Disneyization of zoos. *Tourist studies*. 1(1): 83-104.
- Braverman I. 2014. Conservation without nature: the trouble with in situ versus *ex situ* conservation. *Geoforum*. 5: 47-57. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.geoforum.2013.09.018>.
- Buckley R. 2002. Tourism and biodiversity in north and south. *Tourism Recreation Research*. 27(1): 43-51. doi: 10.1080/02508281.2002.11081355.
- Calver SJ, Page SJ. 2013. Enlightened hedonism: exploring the relationship of service value, visitor knowledge and interest, to visitor enjoyment at heritage attractions. *Tourism Management*. 39: 23-36.
- Carr N. 2016. Star attractions and damp squibs at the zoo: a study of visitor attention and animal attractiveness. *Tourism Recreation Research*. 41(3): 326-338. doi: 10.1080/02508281.2016.1201914.
- Carr N, Cohen S. 2011. The public face of zoos: images of entertainment, education and conservation. *Anthrozoös*. 24(2): 175-189. doi: 10.2752/175303711X12998632257620.
- Catibog-Sinha C. 2008. Zoo tourism: biodiversity conservation through tourism. *Journal of Ecotourism*. 7(2-3): 160-178. doi: 10.1080/14724040802140527.
- Catibog-Sinha C. 2010. Biodiversity conservation and sustainable tourism: Philippine initiatives. *Journal of Heritage Tourism*. 5(4): 297-309. doi: 10.1080/1743873X.2010.517841.
- Catlin J, Jones T, Jones R. 2012. Balancing commercial and environmental needs: licensing as a means of managing whale shark tourism on Ningaloo reef. *Journal of Sustainable Tourism*. 20(2): 163-178. doi: 10.1080/09669582.2011.602686.
- Cong L, Wu B, Morrison AM, Shu H, Wang M. 2014. Analysis of wildlife tourism experiences with endangered species: An exploratory study of encounters with giant pandas in Chengdu, China. *Tourism Management*. 40: 300-310. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2013.07.005>.
- Fennell DA. 2012. Tourism and animal rights. *Tourism Recreation Research*. 37(2): 157-166. doi: 10.1080/02508281.2012.11081700.

- Fennell DA. 2013. Contesting the zoo as a setting for ecotourism, and the design of a first principle. *Journal of Ecotourism*. 12(1): 1-14. doi: 10.1080/14724049.2012.737796.
- Fennell DA, Sheppard V. 2020. Tourism, animals and the scales of justice. *Journal of Sustainable Tourism*. doi: 10.1080/09669582.2020.1768263.
- Fraser J, Wharton D. 2007. The future of zoos: a new model for cultural institutions. *Curator*. 50: 41-54.
- Gross M. 2015. Feature: Can zoos offer more than entertainment?. *Current Biology*. 25: R391-R408. doi: 10.1016/j.cub.2015.04.056.
- Hall MC. 2010. Tourism and biodiversity: more significant than climate change?. *Journal of Heritage Tourism*. 5(4): 253-266. doi: 10.1080/1743873X.2010.517843.
- Keulartz J. 2015. Captivity for conservation? zoos at a crossroads. *J Agric Environ Ethics*. 28: 335-351. doi: 10.1007/s10806-015-9537-z.
- Lamers M, Van Der Duim R, Van Wijk J, Nthiga R, Visseren-Hamakers IJ. 2014. Governing conservation tourism partnerships in Kenya. *Annals of Tourism Research*. 48: 250-265. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2014.07.004>.
- Mason P. 2000. Zoo tourism: the need for more research. *Journal of Sustainable Tourism*. 8(4): 333-339. doi: 10.1080/09669580008667368.
- Mellish S, Pearson EL, McLeod EM, Tuckey MR, Ryan JC. 2019. What goes up must come down: an evaluation of a zoo conservation education program for balloon litter on visitor understanding, attitudes, and behaviour. *Journal of Sustainable Tourism*. 27(9): 1393-1415. doi: 10.1080/09669582.2019.1625908.
- Muntifering JR. 2019. *Large-Scale Black Rhino Conservation in North-West Namibia*. Windhoek (ZA): Venture Publication.
- Patton MQ. 2002. *Qualitative Research and Evaluation Methods: Third Edition*. Thousand Oaks (US): Sage.
- Putu LKM, Riccardo W, Gerard ER, Coralie DL, Patricia SY, Suwat J, Cindy P. 2017. A rapid assessment of wildlife tourism risk posed to cetaceans in Asia. *Journal of Sustainable Tourism*. 25(8): 1138-1158. doi: 10.1080/09669582.2016.1257012.
- Rees PA. 2011. *An Introduction to Zoo Biology and Management*. New Jersey (US): Wiley-Blackwell.
- Ron K, Scott C, Stephanie A. 2015. A universal animal welfare framework for zoos. *Journal of Applied Animal Welfare Science*. 18: S1-S10. doi: 10.1080/10888705.2015.1075830.
- Ryan C, Saward J. 2004. The zoo as ecotourism attraction—visitor reactions, perceptions and management implications: the case of Hamilton Zoo, New Zealand. *Journal of Sustainable Tourism*. 12(3): 245-266. doi: 10.1080/09669580408667236.
- Scollen RJ, Mason A. 2020. Sea World—Gold Coast, Australia’s discourse of legitimation: signage and live animal shows (2015–2018) as indicators of change in messaging. *Journal of Sustainable Tourism*. 28(10): 1686-1701. doi: 10.1080/09669582.2020.1750620.
- Tribe A, Booth R. 2003. Assessing the role of zoos in wildlife conservation. *Human Dimensions of Wildlife*. 8(1): 65-74. doi: 10.1080/10871200390180163.
- Veal AJ. 2006. *Research Methods for Leisure and Tourism A Practical Guide*. 3rd ed. England (GB): Pearson Education Limited.
- Wall V, Fulk R. 2011. Partnerships and collaboration for conservation. *Bgjournal*. 8(1): 12-14. [Diakses 2020 Nov 2]. Tersedia pada: <https://www.jstor.org/stable/10.2307/24811061>.
- Wijeratne AJC, Van Dijk PA, Kirk-Brown A, Frost L. 2014. Rules of engagement: The role of emotional display rules in delivering conservation interpretation in a zoo-based tourism context. *Tourism Management*. 42: 149-156. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2013.11.012>.